

BAB III

KRISIS KEUANGAN YUNANI DAN KONDISI EKONOMI EROPA

Pada bab ini akan menjelaskan secara singkat tentang krisis Yunani, dan faktor-faktor major penyebab adanya krisis Yunani. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan eksternal

A. Krisis Yunani

Permasalahan ekonomi Yunani dimulai pada tahun 1947, pada saat itu Yunani mulai memasuki babak baru dalam pemerintahannya setelah berganti status dari junta militer menjadi sosialis. Lahirnya pemerintahan baru ini kemudian memaksa Yunani untuk mendapatkan pinjaman dana untuk membangun infrastrukturnya. Seiring dengan pembangunan infrastruktur tersebut, dana utang banyak tersedot untuk biaya subsidi, dana pension gaji PNS dll yang berujung pada kegagalan Yunani membayar hutangnya. Hingga mulai tahun 1993 nilai utang Yunani telah melampaui GDP-nya, bahkan saat ini utang Yunani telah memiliki beban utang yang sangat besar, mencapai 177 persen dari produk domestik bruto, atau PDB. (The New York Times, 2012)

Keadaan ini membuat Yunani sulit mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran utang. Selama lima tahun terakhir, Yunani melakukan negosiasi dengan Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional terkait bantuan keuangan untuk mengatasi beban utang mereka. Ketiga lembaga ini dikenal dengan sebutan "troika". Sejak 2010, Troika memberikan pinjaman kepada Yunani dengan syarat kenaikan pajak dan pemotongan belanja. Namun, Yunani tak juga

mampu menyelamatkan kondisi finansialnya. Keadaan ini berujung pada kegagalan Yunani untuk membayar utang sebesar US\$1,7 miliar kepada Dana Moneter Internasional, atau IMF, dengan tenggat waktu yang ditentukan, menjadikan Yunani sebagai negara maju pertama yang gagal membayar utang dan hanya hidup dari uang pinjaman untuk sementara waktu.

Untuk mengatasi permasalahan utang tersebut, Yunani yang merupakan anggota Uni Eropa kemudian mengganti mata uangnya drachma menjadi euro dengan harapan akan mampu memperbaiki perekonomian Yunani. Penyeragaman mata uang menjadi euro tidak diimbangi dengan kesiapan Yunani dalam menghadapinya, ini dapat dilihat dari budaya konsumsi, Yunani yang nilai pendapatan perkapitanya hanya mencapai \$6340, tentu tidak mampu menyaingi daya konsumsi negara lain seperti Perancis dengan GNP \$20.380, Jerman dengan GNP \$ 23.650, atau bahkan negara kecil tapi maju seperti Luxemburg dengan GNP \$ 31.271. Akibat hal tadi adalah adanya arus perputaran uang yang tidak seimbang antara Yunani dengan negara-negara tetangganya. Pada tahun 2008 krisis keuangan mulai benar-benar melanda Yunani, hingga kemudian pada tahun 2010 kondisi ekonominya sudah mengarah pada kebangkrutan dan menyatakan moratorium pada pembayaran hutangnya. (The Economist, 2012)

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh George Soros. (Soros, 2012) Soros menilai bahwa ketidaksamaan persepsi mengenai mata uang euro menjadi kelemahan dari penggunaan euro itu sendiri. Soros melihat euro merupakan mata uang yang tidak komplit, yakni memiliki bank sentral namun tidak memiliki departemen keuangannya. Di dalam masa awal pembentukannya, eurozone dinilai sebagai sistem yang mampu

mereduksi resiko-resiko keuangan yang dihadapi negara. Eurozone menerapkan sistem sedemikian rupa untuk bank-bank sentral agar mampu saling terikat satu sama lain. Hal ini kemudian memudahkan bank-bank komersial di dalam mengakumulasikan negara-negara anggota lemah.

Namun hal ini tidak sejalan dengan praktek yang terjadi, euro menjadi sistem mata uang yang justru mengikat negara-negara lain di dalam suatu krisis keuangan. Soros melihat bahwa Jerman lah yang memiliki posisi menentukan mengenai masa depan dari adanya eurozone. Hal ini mengingat bahwa Jerman merupakan negara kreditur terbesar dalam eurozone dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Soros berpendapat bahwa Jerman mempunyai dua pilihan, tetap bertahan di dalam eurozone atau keluar dari eurozone. Jika Jerman tetap bertahan, maka Jerman perlu untuk melakukan sejumlah perubahan besar. Jerman tidak lagi seharusnya melakukan permintaan pengetatan anggaran bagi negara-negara yang tengah dilanda krisis. Sebab hal ini tidak cukup efektif dan justru semakin memperparah krisis di Benua Eropa. Soros lebih menyarankan agar Jerman keluar dari eurozone. Jika Jerman keluar dari eurozone maka akan terjadi gejolak politik yang akan berlangsung sementara. Namun dalam dampak jangka panjang, hal ini akan lebih menstabilkan kondisi euro sebagai mata uang. (Soros, 2012)

Krisis Yunani yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya ini banyak dianggap sebagai sebuah kesalahan sistem eurozone yang diterapkan di negara-negara Uni Eropa. Hal ini membuat beberapa pihak berpandangan untuk mengeluarkan Yunani dari negara anggota eurozone. Dengan melihat kenyataan bahwa Yunani telah mengalami defisit hingga empat kali lipat dari batas yang ditentukan eurozone, maka

dapat dipandang bahwa Yunani tidak mampu untuk turut bergabung di dalam eurozone ini. Hal ini turut pula membawa kepada perdebatan mengenai keefektifan mata uang bersama untuk diaplikasikan di suatu kawasan. Terjadi perdebatan pada penentuan nasib Yunani di dalam eurozone, dimana 80% masyarakat Yunani lebih memilih agar Yunani bertahan dengan mata uang euro. Mayoritas masyarakat ini memilih tetap menggunakan euro sebagai mata uangnya untuk menghindari semakin terpuruknya perekonomian Yunani jika harus kembali menggunakan mata uang drachma. Ketakutan akan menurunnya investor dan inflasi yang meninggi menjadi faktor-faktor mengapa beberapa pihak tetap menginginkan Yunani berada dalam eurozone. Hal ini dapat saja terjadi jika Yunani mampu untuk mengatasi kebijakan pengetatan anggarannya. Namun jika pengetatan anggaran ini diingkari oleh Yunani, maka Yunani dapat saja keluar dari eurozone untuk selanjutnya kembali menggunakan drachma sebagai mata uangnya. Kebijakan pengetatan anggaran ini perlu untuk dilakukan Yunani setelah Uni Eropa, yang dipimpin oleh Jerman, mengucurkan dana bantuan atau bailout guna mengatasi krisis Yunani. (The Economist, 2012)

Banyak kalangan berpendapat terkait krisis yang melanda Yunani, Lynn dalam “Bust: Greece, the Euro and the Sovereign Debt Crisis” menuliskan bahwa belum terselesaikannya krisis di zona Eropa dikarenakan terlambatnya para petinggi–petinggi di zona Eropa dalam menyadari kondisi keuangan Yunani yang sudah tidak mampu membayar jatuh tempo hutangnya. Hal lain adalah keengganan negara-negara dengan perekonomian kuat seperti Jerman untuk menolong Yunani pada awal krisis hutang ini terjadi. Ketika krisis meletus pada tahun 2008, kondisi Yunani sudah demikian parah sehingga menyebabkan kepanikan terhadap pasar. (Lynn, 2013)

Ada Faktor-faktor Internal Penyebab terjadinya Krisis Yunani:

1. Pengeluaran pemerintah yang besar dan kurang mencapai target yang tepat, kurang adanya program-program yang meningkatkan pendapatan, anggaran militer yang besar.
2. Terlampau banyaknya jumlah pegawai negeri dan biaya dana pensiun yang dikeluarkan pemerintah Yunani, besarnya upah minimum yang ditetapkan Yunani.
3. Tingginya tingkat korupsi di Yunani, yang berakibat pula pada birokrasi yang buruk. Banyak juga penggelapan dana pajak yang dilakukan pemerintah Yunani.
4. Peraturan dalam ECB dengan mata uang tunggal yang menyebabkan tidak mampunya negara *Eurozone* untuk mengatur sistem moneter negaranya sendiri, dan dapat menyebabkan daya saing negara berkurang.

Adapun faktor-faktor Eksternal Penyebab terjadinya Krisis Yunani:

1. Mudahnya mendapatkan dana pinjaman hutang anggota *Eurozone* dan kurang ketatnya pengawasan akan negara anggota yang melanggar Stability and Growth Pact(SGP).
2. Krisis Finansial Global pada tahun 2008. Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat investasi dan kepercayaan investor dalam menyimpan dana.

Dalam keanggotaan Uni eropa, Yunani hanyalah sebuah negara kecil yang menyumbangkan sekitar 2,6% dari keseluruhan GDP di *Eurozone*, namun mengapa krisis yang melanda Yunani ini begitu ditakuti oleh negara lain khususnya negara-negara yang berada di *Eurozone*. Jawabannya tidak lain adalah karena Yunani adalah salah satu anggota Uni eropa yang menggunakan mata uang Euro sehingga ketika salah satu negara anggotanya mengalami krisis dapat diperkirakan negara-negara lain

khususnya yang menggunakan mata uang Euro akan terkena efek dari krisis ini secara langsung sejalan dengan Domino effect Theory yang sering digunakan oleh banyak ekonom untuk menggambarkan penyebaran krisis ekonomi di seluruh dunia.

Dalam keanggotaan Uni Eropa, Yunani sebenarnya memiliki potensi investasi yang cukup menarik bagi para investor, namun krisis yang melanda daratan Eropa belakangan ini telah menimbulkan ketidakpercayaan para investor terhadap sektor keuangan di Eropa khususnya Yunani dan hal ini tentu akan memperparah krisis di Yunani dan jika krisis ini tidak ditanggulangi maka Yunani terancam benar-benar bangkrut

Krisis Eropa yang diawali dengan kejatuhan perekonomian Negara anggota Uni Eropa yang dipicu oleh melonjaknya beban utang dan defisit fiskal negara anggota Uni Eropa, utamanya Yunani. Keserakahan pemerintah di beberapa negara Eropa, seperti Yunani, Portugal, Irlandia, dan Spanyol. Manajemen budget pemerintah amat buruk. Pengeluaran pemerintah, yang dibiaya hutang, amat boros. Akibatnya, mereka kesulitan membayar hutang. Keserakahan pemerintah ini juga ditopang dengan keserakahan lembaga pemberi hutang, yang terus berani memberikan hutang pada pemerintah di negara negara tersebut.

Sekarang negara-negara ini mengalami kesulitan membayar hutang mereka. Kalau mereka gagal membayar hutang mereka, akan banyak pihak pemberi hutang, yang akan menderita rugi besar. Kerugian pemberi hutang, khususnya bank dan lembaga keuangan lain, akan menjalar ke pihak lain. Kesaling-terkaitan antara berbagai bank dan lembaga keuangan akan berdampak pada meluasnya dampak krisis keuangan

ini ke banyak negara Eropa, termasuk Jerman dan Perancis. Di luar Eropa, negara yang keuangan pemerintahnya tidak baik akan mudah terkena dampak ini, termasuk Jepang. Negara yang amat menggantungkan pada ekspor akan sangat terkena dampak krisis keuangan ekonomi global ini.

IMF memperkirakan aksi jual aset oleh perbankan tersebut muncul karena ketidakpercayaan pelaku pasar pada efektivitas kebijakan Eropa. Selain itu, faktor naiknya biaya dana serta makin tertekannya sistem perbankan juga memicu aksi bank tersebut. Sejumlah aksi yang telah dibuat memang telah menciptakan keuntungan namun upaya itu dianggap tak cukup untuk menciptakan stabilitas yang berkesimbangan. Dari skenario yang dibuat IMF, aksi jual aset bank di Eropa itu bisa membuat pasokan dana pinjaman untuk wilayah tersebut mengecil hingga 4,4 persen. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Eropa dipastikan melemah 1,4 persen.

Namun kebijakan tersebut membawa dunia berada di ujung tanduk untuk terjerebab dalam krisis lebih buruk lagi. Tidak terbayangkan apabila rakyat Yunani memutuskan untuk tidak mau menerima langkah penyelamatan hanya karena tidak mau subsidi yang sudah mereka nikmati dihapuskan. Seluruh surat utang negara akan tidak berharga dan seluruh pemegang surat utang harus menanggung kerugian yang sangat besar. Yang paling ditakutkan, semua orang khawatir kepada surat-surat utang yang mereka pegang. Ketika mereka berlomba untuk menjualnya, maka nilainya akan semakin terpuruk. Ini akan bisa menyebabkan efek domino kebangkrutan negara-negara Eropa. Negara-negara yang diantisipasi mengikuti jejak Yunani adalah Spanyol dan Italia. Kalau jumlah rakyat Yunani di bawah 10 juta, jumlah rakyat di Spanyol dan

Italia jumlahnya di atas 50 juta orang. Ukuran ekonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar dari Yunani.

Salah satu lembaga pemeringkat utang terkemuka, Moody's Investors Service, masih menetapkan rating utang Yunani pada salah satu level terendah, yaitu CCC. Tantangan yang begitu hebat dihadapi para pemimpin Eropa, sejak bangkrutnya Yunani, disusul Irlandia, Spanyol, merembet ke Itali, Inggris, dan terakhir melanda Perancis, yang masuk ke jurang krisis akibar utang. Perancis nasibnya sama seperti Amerika Serikat yang telah diturunkan peringkat rating kreditnya dari AAA menjadi AA+. Perancis yang mempunyai utang yang setara dengan 95 % PDB nya, sudah tidak lagi mampu mengatasinya. Tidak banyak pilihan yang bisa dilakukannya, kecuali hanya dengan memotong defisit anggaran, dan itu pasti akan membawa malapetaka kepada krisis politik dan sosial. Ujungnya terjadinya pemberontakan rakyat. Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel mengumumkan langkah-langkah kebijakan mengatasi krisis utang, tetapi tidak mempunyai dampak positif di pasar. Bursa saham di Uni Eropa terus berguguran sampai titik yang paling rendah. (Priambodo, 2016)

Antara tahun 1980-1990-an, Yunani memiliki hutang yang besar terkait dengan defisit anggaran. Sehingga ketika dilakukan *Maastricht Treaty* (Perjanjian Uni Eropa), 7 Februari 1992, Yunani menjadi satu-satunya anggota masyarakat Eropa (*Europe Community* (EC)) yang tidak dapat memenuhi kriterianya.

Sebenarnya Uni Eropa telah membuat suatu peraturan yang mana mengatur agar keadaan fiskal maupun moneter lebih stabil. Adapun kriteria Maastricht (yang juga

dikenal sebagai ”kriteria pergeseran”) pada dasarnya adalah adalah kriteria dalam mengadopsi mata uang euro sebagai mata uang masyarakat Eropa. Dimana tujuan penetapan kriteria ini adalah untuk mempertahankan harga kestabilan di *Eurozone* meski ada negara anggota yang baru bergabung. Keempat kriteria utama ini didasarkan pada Pasal 121(1). (Perjanjian Maastricht, 2016)

1. Tingkat inflasi:

Tidak boleh lebih dari 1,5 poin persen lebih tinggi daripada rata-rata tiga negara anggota dengan inflasi terendah di Uni Eropa.

2. Keuangan pemerintah:

Defisit pemerintah tahunan:

a. Rasio defisit pemerintah tahunan dengan produk domestik bruto (PDB) tidak boleh lebih dari 3% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Jika tidak, negara tersebut diwajibkan mencapai tingkat mendekati 3%. Hanya eksekses pengecualian dan sementara yang diperbolehkan untuk dikecualikan.

b. Utang pemerintah: Rasio utang pemerintah bruto dengan PDB tidak boleh lebih dari 60% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Bahkan jika target ini tidak tercapai karena kondisi tertentu, rasio tersebut harus setidaknya berkurang dan mendekati nilai referensi dengan progres yang memuaskan. Pada akhir 2010, hanya dua negara anggota Uni Eropa, Polandia dan Republik Ceko, yang mencapai target ini,

3. Nilai tukar: Negara pendaftar harus menjalani mekanisme nilai tukar (ERM II) di bawah Sistem Moneter Eropa (EMS) selama dua tahun berturut-turut dan tidak boleh mendevaluasi mata uangnya selama periode tersebut.
4. Tingkat suku bunga jangka panjang: Tingkat suku bunga jangka panjang nominal tidak boleh lebih dari 2 poin persen lebih tinggi daripada di tiga negara anggota yang mengalami inflasi terendah.

Inflasi, defisit anggaran, hutang, dan suku bunga yang tinggi membuat Yunani tidak dapat bergabung dalam masyarakat Uni Eropa. Namun Yunani terus berusaha memperbaiki perekonomiannya dengan berbagai program penghematan hingga usaha ini membuahkan hasil. Yunani akhirnya dapat memenuhi kriteria: inflasi 2,1%, defisit anggaran 1,7% dari GDP, dibawah 3% ketentuan Perjanjian Maastricht.

Inti dari upaya ‘mati-matian Yunani untuk bergabung dengan masyarakat Uni Eropa adalah untuk “mendompleng” kestabilan ekonomi Eropa. Namun harapan tersebut agaknya bagai api jauh dari panggang, justru Yunani belakangan menjadi penjerumus ekonomi Eropa.



Grafik 1. Tingkat pengangguran Yunani

Source: www.tradingeconomics.com

Yunani, yang berkebutakan dengan krisis utang di tahun keenam, pernah mencatat rekor penangguran 28%, yaitu pada September 2013. Meskipun tingkat pengangguran Yunani turun dari rekor, angka ini masih dua kali lipat daripada rasio pengangguran di seluruh *Eurozone*. Kawasan yang berbagi mata uang Euro ini mencatat pengangguran 11,5% pada bulan Oktober. Dan semenjak tahun 2010 tingkat pengangguran di Yunani terus naik. Upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran di Yunani masih belum dapat diturunkan secara signifikan oleh pemerintah



Grafik 2: Index Korupsi Yunani

Source: www.tradingeconomics.com

Semua orang mengetahui bahwa korupsi adalah masalah tetapi karena korupsi terjadi di mana-mana sehingga sulit untuk menentukan dari mana harus memulai untuk memeranginya. Dan hal inilah yang menjadi dasar kuat mengapa mengapa krisis berdampak parah di Yunani dibanding negara-negara yang tergabung di EU lainnya. Tingkat korupsi di Yunani sempat turun drastic d tahun 2010 dimana index korupsi hanya 38% sampai di posisi terendah pad 2012 mencapai 34%. Mengingat aturan ketat dari Uni Eropa yang mengharuskan dana *bailout* harus dipergunakan sebaik mungkin untuk menangani krisis. Akan tetapi hal itu tidaklah bertahan lama karena pada 2014 index korupsi naik menjadi 43%. Hampir sama seperti sebelum krisis melanda Yunani.



Grafik 3. GDP per kapita Yunani

Source: www.tradingeconomics.com

GDP per kapita Yunani mengalami penurunan yang signifikan dari 2008 sempat memcatatkan rekor dalam sepuluh tahun terakhir yaitu USD 24.300 dan mencetak rekor terendah pada 2014 sebesar USD 18.120. Ekonomi Yunani sedang hancur. Yunani mengalami krisis akibat kebanyakan berutang dan tidak mampu membayarnya. Yunani bahkan telah menyatakan diri tidak bisa membayar sedikitpun utangnya kepada International Monetary Fund (IMF) sebesar 1,54 miliar Euro hingga jatuh tempo pada 30 Juni 2015.

B. Kondisi Eropa Dalam Menghadapi Krisis Yunani

Dalam sejarah perjalanannya, Uni Eropa menjelma menjadi satu kekuatan baru yang tangguh dan disegani masyarakat internasional karena dianggap sebagai satu-satunya organisasi regional yang berhasil secara penuh mengintegrasikan anggota-anggotanya dalam satu wadah kebijakan bersama dan menjadi organisasi yang selalu

dicermati kebijakannya, karena dapat dipastikan membawa dampak internasional lantaran kebijakan tersebut merupakan suara bersama yang ditaati oleh semua negara anggotanya. Kebijakan bersama Uni Eropa sangat terlihat pengaruhnya di bidang ekonomi, meskipun dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan Uni Eropa masih memberikan pengecualian untuk tidak ditaati karena kondisi-kondisi khusus yang dialami negara anggota.

Penyatuan mata uang menjadi Euro merupakan salah satu langkah negara-negara Eropa untuk mencetak “Eropa Baru” yang lebih kuat di pentas ekonomi dan politik dunia. Jika harapan ini terwujud, akan lahir Eropa Baru yang terintegrasi dengan konsumen sekitar 300 juta jiwa dan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) 6 triliun dollar. Eropa Baru ini bisa saja menandingi Amerika Serikat yang telah lebih dahulu dikenal sebagai negara *superpower*. Kekuatan baru ini akan bertambah besar jika Inggris, Denmark, Swedia, dan beberapa negara *Zona Non Euro* lainnya bergabung ke klub Euro atau menggunakan mata uang Euro.

Proses transisi dari European Monetary System (EMS) menuju EMU telah disebutkan dalam perjanjian Maastricht yang disepakati oleh para pemimpin Eropa pada bulan Desember tahun 1991. Dari ketiga tahapan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa tahap pertama dan kedua ditujukan sebagai masa persiapan dan penyesuaian kebijakan moneter dan fiskal masing-masing negara anggota Uni Eropa sebelum tergabung kedalam Eurozone atau Eurozone. Terkait dengan hal tersebut Uni Eropa, dalam perjanjian Maastricht, mengembangkan sebuah mekanisme makroekonomi untuk menilai kesiapan negara anggota dalam mengadopsi Euro

dan masuk kedalam European Monetary Union (EMU) serta menjaga kestabilannya pasca EMU. Kriteria tersebut diantaranya adalah (Afxentiou, Et all., 1996: 249)

1. Tingkat inflasi di negara yang bersangkutan tidak boleh lebih dari poin 1.5 persentase diatas rata-rata dari tiga negara anggota Uni Eropa dengan inflasi terendah.

2. Negara yang bersangkutan harus menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam mekanisme kurs atau Exchange Rate Mechanism (ERM) tanpa mendevaluasi inisiatif mata uangnya sendiri.

3. Tingkat defisit sektor publik dari negara yang bersangkutan tidak boleh lebih dari 3 persen atas nilai Produk Domestik Bruto.

4. Tingkat hutang publik dari negara yang bersangkutan harus berada dibawah atau mendekati tingkat acuan sebesar 60 persen dari nilai Produk Domesetik Bruto.

5. Nilai suku bunga jangka panjang dari negara yang bersangkutan tidak boleh lebih tinggi dari 2 poin persentase diatas tiga negara anggota Uni Eropa dengan nilai suku bunga jangka panjang terendah. Nominal angka yang tercantum dalam perjanjian tersebut disebut sebagai reference value.

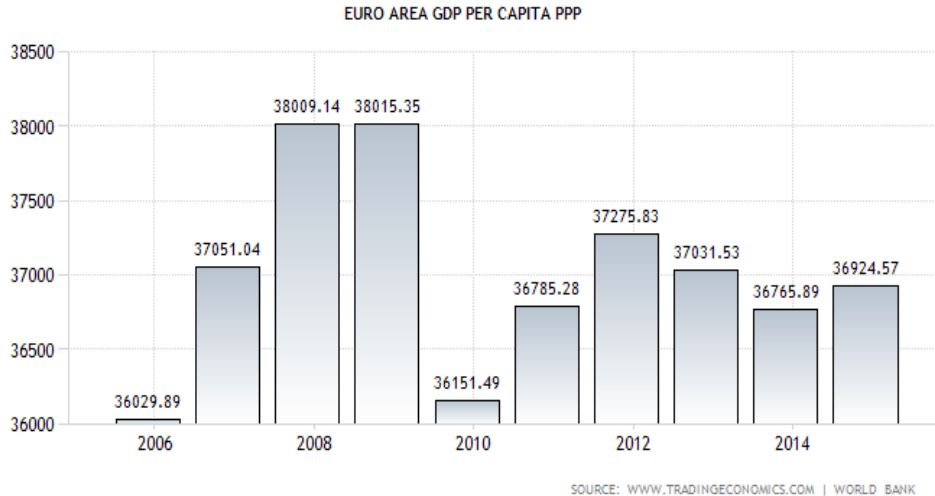
Dengan menjadi negara anggota EMU berarti, masing-masing negara anggota harus berupaya untuk menjaga kondisi perekonomian moneterinya. Implementasi kebijakan ekonomi moneter dari konvergensi tersebut tidak mudah dilakukan karena diperlukan penyesuaian awal terhadap kondisi makro ekonomi di

masing-masing negara. Sehingga Perjanjian Maastricht memberi tenggang waktu sementara, untuk melakukan penyesuaian tersebut. Penurunan nilai defisit suatu negara harus dilakukan secara perlahan dan berkesinambungan hingga mencapai nilai defisit yang tercantum dalam Perjanjian Maastricht

Perjalanan sejarah Uni Eropa sebenarnya nyaris penuh dengan keberhasilan. Tahun 1995 hampir seluruh negara Eropa Barat bergabung. Tahun 1998 sistem keuangan Eropa terintegrasi dalam mata uang tunggal *Euro*. Tahun 2004 bertambah lagi 10 negara Uni Eropa baru dari mantan negara komUni Eropa Timur. Ini menjadikan Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia sekaligus menjadi satu-satunya contoh organisasi regional terbaik dunia. Wajar saja kalau keberadaannya dikagumi oleh organisasi regional lain di dunia dan mejadi sebuah *role modele*.

Namun, kondisi ini berbalik dan membuat harapan itu goyah dengan adanya krisis ekonomi global yang mulai melanda Uni Eropa pada tahun 2008 sampai saat ini. Krisis ekonomi tersebut telah membuat Uni Eropa mulai memasuki fase-fase sulit. Krisis ekonomi Uni Eropa berasal dari kredit macet perumahan di Amerika Serikat yang telah menyebabkan krisis finansial global. Kedua krisis tersebut telah membawa implikasi buruk pada kondisi ekonomi global secara menyeluruh hampir di setiap negara baik di Kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia Pasifik. Dampak tersebut terjadi karena tiga permasalahan yaitu adanya investasi langsung, investasi tidak langsung, dan perdagangan. Saat ini, hampir semua negara-negara di dunia menganut sistem pasar bebas sehingga terkait satu sama lain. Aliran dana bebas keluar masuk dari satu negara ke negara lain dengan regulasi moneter tiap negara yang beragam. Akibatnya setiap

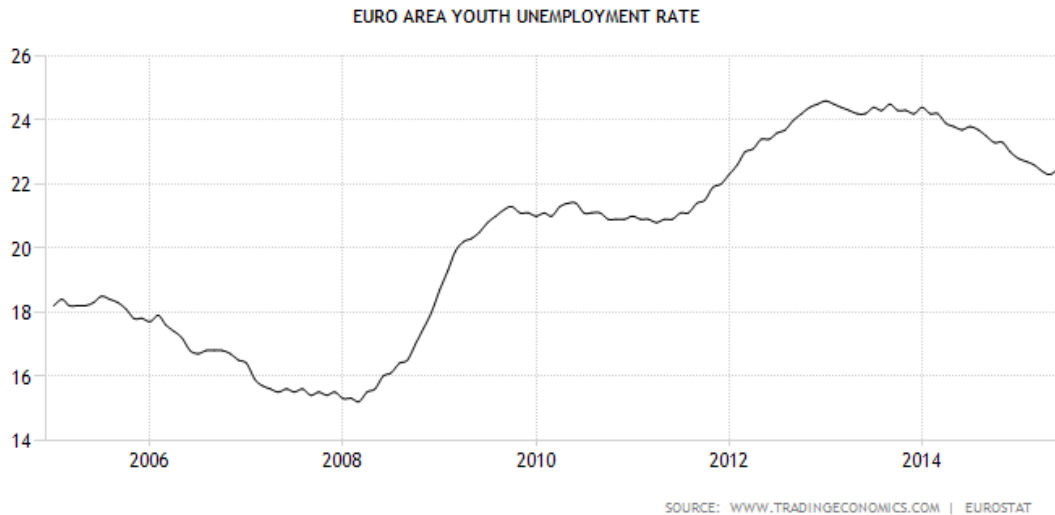
negara memiliki risiko terkena dampak krisis. Begitulah alur krisis finansial Amerika Serikat mempengaruhi Uni Eropa sehingga bisa dilanda krisis ekonomi.



Grafik 4: GDP per kapita Euro Area

Source: www.tradingeconomics.com

GDP perkapita Eropa jelas sangat terdampak dengan krisis yang melanda Yunani. Kemerosotan pendapatan perkapita yang sangat menurun tajam sejak 2010, Dimana GDP per kapita hanya di angka USD36.151 padahal di tahun sebelumnya negara Eurozone mencatatkan GDP per kapita sebanyak USD38.015. Perekonomian mulai naik di tahun berikutnya sejak dana talangan pertama dikururkan oleh Uni Eropa.



Grafik 5: Pengangguran Usia Muda Eropa

Source: www.tradingeconomics.com

Turunnya ekonomi di Eropa menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan baru bagi penduduk usia muda. Penduduk usia muda yang seharusnya di usia produktif bisa mendapat pekerjaan tetapi terganjal dengan minimnya lapangan pekerjaan. Di tahun 2015 ini penduduk usia muda yang menganggur mencapai angka 22.5%. Sangat jauh jika dibandingkan saat 2008 sebelum krisis melanda Eropa yang hanya di angka 14,9%.



Grafik 6: Euro to Dollar exchange rate

Sumber: <http://www.xe.com/currencycharts>

Nilai tukar mata uang Euro terhadap Dolar AS mencapai kurs terendah dalam 10 tahun terakhir di 2015. Situasi tidak menentu di Yunani dan pernyataan direktur Bank Sentral Eropa terkait politik uang memicu jatuhnya kurs Euro. Haluan politik uang dari Bank Sentral Eropa-ECB yang tetap akan memberikan pinjaman untuk mencegah inflasi serta situasi tidak menentu di Yunani mendevaluasi nilai tukar mata uang Euro di pasar internasional. Kurs Euro terhadap Dolar AS pada pembukaan pasar di Asia mencapai rekor terendah sejak Maret 2006 yakni di bawah 1,20 Dolar AS. Krisis politik serta situasi yang tidak menentu di Yunani menjelang pemilu parlemen memicu debat kemungkinan didepaknya negara itu dari Eurozone. Kondisi keseluruhan di negara Euro yang terus dirundung krisis utang amat berat itu, terus menerus memicu sentimen negatif di pasar uang.

Dampak krisis utang Yunani dikhawatirkan merembet ke negara-negara tetangganya di Benua Biru dan mengancam keutuhan Uni Eropa. Pasalnya, 66 persen

utang Yunani atau sebesar € 214 miliar merupakan dana talangan atau bailout yang merupakan patungan Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Bank Sentral Eropa (ECB) dan negara-negara UE lainnya. (Supriadi, 2015)

International Monetary Fund (IMF), juga punya andil dalam menambah pundi-pundi utang Negeri Para Dewa. Total utang yang disuntikan IMF ke Athena sebesar € 32 miliar atau 10 persen dari total utang Yunani. Dalam hitungan hari ke depan atau tepatnya hingga akhir Juni 2015, sebagian utang Yunani ke IMF akan jatuh tempo. Total angsuran yang harus dibayarkan Yunani ke IMF pada pekan depan sebesar € 1,6 miliar.

Padahal Perdana Menteri Yunani Alex Tsipras menyatakan negaranya terancam bangkrut pada akhir bulan Juni 2015 jika para kreditor tidak memberikan tambahan dana talangan (*bailout*) sebesar € 7,2 milyar. Bank Sentral Yunani bahkan mengingatkan, jika negosiasi Tsipras gagal tak hanya akan memicu gagal bayar tetapi juga bisa berujung pada keluarnya Yunani dari Uni Eropa, atau yang dikenal dengan istilah *Greece Exit (Grexit)*. (Herdiawan, 2015)

Pemicu lain dari tekanan pasar adalah kanselir Jerman, Angela Merkel serta menteri keuangan Wolfgang Schäuble yang tidak bersedia habis-habisan membela posisi Yunani di Eurozone. Pemerintah Jerman menilai, efek keluarnya Yunani dari zona mata uang bersama Euro saat ini bisa ditanggulangi.

Publik Yunani sebenarnya menolak wacana Grexit karena bisa memicu pelarian modal asing, membuat banyak bank tutup, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kekacauan ekonomi dan sosial yang luas. Sementara bagi Uni Eropa, Grexit bisa

memecah persatuan dan menjadi awal berakhirnya mata uang Euro. Pasalnya, jika kepercayaan pasar terhadap Euro luntur, maka krisis utang bisa merembet ke negara lain yang dikhawatirkan akan mengikuti jejak Yunani keluar dari Uni Eropa.

Menyikapi kondisi darurat utang ini, sejumlah petinggi negara-negara Uni Eropa pun menggelar *Emergency Summit* di Brussels di Belgia. Mereka meminta Yunani melakukan reformasi keuangan untuk bisa mendapatkan tambahan pinjaman dari kreditor Eropa maupun IMF. Inisiatif yang ditawarkan adalah dengan mengurangi dana pensiun, menaikkan pajak penjualan dan pajak usaha. (Aliya, 2015)

Pengadaan referendum pun dilakukan untuk member pilihan rakyat untuk menerima atau menolak dana talangan baru dengan persyaratan yang lebih ketat. Tsipras, yang menginisiasi referendum itu, ingin agar rakyatnya memilih “oxi” yang artinya “tidak.” Menurutnya, pilihan “tidak” akan memperkuat posisi tawarnya di depan para pemilik dana talangan.

Kelompok oposisi tidak setuju dengan pendapatnya, dan berargumen pilihan “oxi” hanya akan memberi sinyal ke seluruh Eropa bahwa Yunani tidak mau lagi bergabung di *Eurozone*. Dalam titik ini, keluar dari *Eurozone* dan kembali ke mata uang lama, Drachma, akan sangat mengganggu. Nilai uang yang dipegang rakyat dan bank akan jatuh. Harga-harga akan melonjak. Hidup akan menjadi lebih sulit. Selain itu, utang masih ada dan dana yang ada tak cukup untuk membayarnya. Ujungnya adalah bencana ekonomi bukan hanya bagi Yunani tetapi bagi negara lain di kawasan *Eurozone*.

Uni Eropa adalah lembaga professional yang telah lama berdiri tidak berarti dapat menaggulangi krisis dengan mudah. Menurut data yang menyurut pendapat masyarakat Uni Eropa terhadap institusi-institusi Uni Eropa yaitu European Central Bank, Council of the European Union, European Parlement dan European Commision. Keempat institusi tersebut mengalami penurunan kepercayaan yang signifikan. Komisi Eropa menjadi institusi yang mengalami penurunan paling tajam hal ini dikarenakan komisi Eropa adalah di karenakan komisi Eropa adalah institusi yang mengawasi implementasi regulasi-regulasi Uni Eropa, hal ini berarti komisi Eropa adalah wajah dari supranasional Uni Eropa dan yang menjadi manifestasi Uni Eropa dalam mengintervensi kedaulatan negara-negara anggotnya. Sehingga dapat dilihat kepercayaan masyarakat Eropa terhadap institusinya Uni Eropa sudah sangat berkurang.